

Implementasi Program Pelayanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara

Meliano Miojo

Masje S. Pangkey

Femmy M.G. Tulusan

Abstrak: Air dan sanitasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang diperhadapkan dengan permasalahan kebutuhan air dan pengelolaan sanitasi yang tidak sesuai dengan standard kesehatan. Penelitian ini dengan menggunakan desain kualitatif mengkaji implementasi program pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara. Temuan penelitian bahwa implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kelurahan Talikuran belum baik karena kurangnya kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan, pembagian tugas dan tanggung jawab kepada staf dan ketidakmampuan aparatur didalam melaksanakan program.

Kata Kunci: Implementasi Program; Air Minum; Sanitasi. Masyarakat.

PENDAHULUAN

Perilaku hidup bersih serta sehat berperan penting serta terdapat tantangan tersendiri dalam membentuk pencapaian kesehatan masyarakat. Perihal ini, meskipun tersadarnya masyarakat tentang perilaku hidup bersih serta sehat sudah lebih besar, namun ketentuan yang mengatur perilaku tersebut di masyarakat masih relatif terbatas. Masa otonomi daerah kini mengamanatkan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh agar sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan layanan air minum serta sanitasi, yang keduanya terhubung langsung dengan masalah kesehatan masyarakat, yakni jenis layanan mendasar yang menjadi kewajiban pemerintah kota ataupun kabupaten.

Mengingat bermacam tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air minum

serta sanitasi yang baik, lahirlah program *third water supply and sanitation for low income community* (WSLIC) yang selanjutnya disebut selaku PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) guna membentuk masyarakat yang bersih serta sehat dengan adanya penyediaan air bersih serta sanitasi. Penyelenggaraan program PAMSIMAS didasarkan dengan kebijakan Pemerintah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN menetapkan bahwasanya semua masyarakat Indonesia harus memiliki akses terhadap fasilitas air minum dan sanitasi pada akhir periode pelaksanaan RPJMN, yang berlangsung dari 2015 hingga 2019.

Program ini diaplikasikan di wilayah pinggiran kota dan pedesaan.

Program PAMSIMAS dirancang untuk meningkatkan jumlah orang yang tidak diawasi, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah di daerah pinggiran kota dan pedesaan, menunjang implementasi nilai serta perilaku hidup bersih dan sehat guna mencapai tujuan di bidang air dan sanitasi dengan memperluas pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Perihal ini akan memungkinkan akses yang lebih besar ke layanan air minum serta sanitasi yang berkelanjutan.

Lokasi yang menjadi penerima Program PAMSIMAS di Kecamatan Kawangkoan Utara tahun 2014 yakni Kelurahan Talikuran. Mayoritas penduduk Desa Talikuran termasuk golongan menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat bekerja selaku buruh, sementara yang lain yakni petani. Cukup sulit bagi sebagian besar penduduk setempat untuk memperoleh air bersih. Dengan bantuan Program PAMSIMAS, harapannya masyarakat akan memperoleh pelayanan yang baik dari program PAMSIMAS dan masyarakat sekitar akan terlibat dalam keterlibatan proses pelaksanaan program dan kelangsungannya.

Terdapatnya program PAMSIMAS, seluruh masyarakat merasakan rasa syukur atas penyediaan fasilitas air bersih namun, ada masalah dengan program PAMSIMAS, akibatnya pengamatan awal peneliti mengungkapkan bahwasanya masalah berikut muncul sebagai akibat dari pelaksanaan program yakni: Dari lima lingkungan yang ada di kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara belum seluruhnya mendapatkan program penyediaan air bersih yang ada dan sudah beroperasi yaitu lingkungan 1, 3 dan 4 sedangkan lingkungan 2 dan 5 belum mendapatkan program tersebut. Dengan adanya dua lingkungan yaitu lingkungan 2 dan 5 belum mendapatkan program tersebut maka kedua lingkungan ini terpaksa harus mengambil air dari lingkungan terdekat dengan cara menyambungkan selang dari pipa yang sudah dialiri air kerumah

masing – masing dan hal ini menimbulkan permasalahan karena masyarakat harus bergilir untuk mendapatkan aliran air karena pipa yang tersedia untuk menyambungkan selang ke rumah – rumah penduduk hanya satu sehingga harus bergantian untuk memasang selang. Hal ini banyak dikeluhkan masyarakat sehingga mereka berharap agar pemerintah dapat lagi memprogramkan penyediaan air bersih seperti ini dimasa yang akan datang.

Permasalahan tersebut, tak lepas dari keterlibatan pemerintah Kelurahan Talikuran yang yakni representasi pemerintah di tingkat Kelurahan/desa. Pemerintah kelurahan memiliki keterlibatan dalam program PAMSIMAS dimulai dari perencanaan sampai pemeliharaan serta juga dukungan dari aktivitas program berdasarkan dengan tugas serta fungsinya.

Sesuai asumsi awal peneliti Permasalahan tersebut didorong oleh beberapa faktor, baik oleh masyarakat maupun badan pengelola pelaksana. Pertama, Salah satu tantangan mendasar di atas adalah tuntutan kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas untuk memenuhinya. Jelaslah bahwa pertumbuhan penduduk membutuhkan fasilitas pelayanan yang lebih banyak. Kedua, Dalam menghadapi kesulitan saat ini, kurangnya kerjasama antara pelaksana program dan masyarakat, sehingga sulit untuk mengidentifikasi solusi yang cocok dan disetujui oleh seluruh masyarakat. Ketiga, Pihak pelaksana kurang melaksanakan pengamatan terhadap geografi wilayah yang diberikan bantuan sebelum program dilaksanakan, yang mana konsep pendistribusian program secara adil tidak dirasakan secara merata oleh semua masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Monintja, dkk (2017) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga diperlukannya program kerja yang dalam implementasi dapat terlaksana secara baik.

Implementasi adalah kegiatan dan proses menerapkan kebijakan. Keberhasilan suatu program, seperti konsep implementasi, merupakan tujuan dari implementasi sesuai Grindle dalam (Akib, 2012) menyebutkan bahwasanya: “Implementasi adalah tindakan administrasi umum yang bisa dieksplorasi pada tingkat program, serta hanya akan bermula jikalau tujuan serta sasaran sudah ditentukan, program kegiatan sudah dibuat, dan keuangan sudah disisihkan dan diarahkan guna mencapai tujuan”. Meter dan Horn menekankan tujuan implementasi yakni guna mewujudkan jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik dengan kegiatan instansi pemerintah yang mencakup berbagai pemangku kepentingan (Grindle, 1980). Fokus utama perhatian pada implementasi kebijakan yakni guna memperoleh pemahaman mengenai apa yang sebenarnya dialami di masyarakat setelah suatu program dinyatakan operasional ataupun dirumuskan (Wahab, 2008). Sementara oleh Grindle (1980) menerangkan bahwasanya tahapan implementasi hanya akan dimulai setelah tujuan dan sasaran kebijakan ditentukan, program telah dikembangkan dan siap dan sumber daya telah disalurkan untuk mencapai tujuan.

Model tersebut menggambarkan tahapan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh banyak pemain, dengan output ataupun konsekuensi dari pilihan tersebut, berupa materi program, yang dilakukan oleh pengambilan keputusan dalam kerangka politik administratif. Tahapan politik bisa melibatkan banyak pemain kebijakan dalam pengambilan keputusan, serta proses administrasi yang dapat dianggap sebagai serangkaian tugas administratif umum yang bisa dilakukan pada tingkat program (Akib, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini berpijak pada konsep yang dikemukakan oleh Edward III (1980:9) dalam Tahir

(2014:6) yang menilai keberhasilan implementasi dari komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan pelaksana serta struktur birokrasi

Metode yang dipakai guna melakukan pengumpulan data yakni wawancara, pengamatan dan telaah data sekunder. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan melihat deskripsi hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara maka penulis mencoba membahasnya dengan berpedoman pada suatu teori yang dikemukakan oleh Edward III (1980:9) dalam Tahir (2014:61) yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari beberapa aspek yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi.

Dalam kajian implementasi program melalui komunikasi, peneliti mengkaji bahwa komunikasi yang terjadi disini yaitu alur komunikasi suatu urat yang mana tidak beraturan tapi mempunyai tujuan tertentu. Komunikasi seperti ini lebih bersifat himbuan yang dituruti atau tidak dituruti tidak masalah. Dilihat dari informasi yang diberikan oleh aparat pemerintah Kelurahan Talikuran yang hanya melalui pengumuman pada pengeras suara dan dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat maka sebagian masyarakat yang tidak mendengar pengumuman dan yang tidak menghadiri acara maka dipastikan mereka tidak mengetahui program yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Talikuran dan hal tersebut bisa menghambat pelaksanaan program penyediaan air minum sebab kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan akan berbeda – beda.

Dilihat dari aspek sumber daya, secara kuantitas aparat pemerintah Kelurahan Talikuran dapat dikatakan cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Namun dari segi kualitas sumber daya manusianya belum mendukung apalagi pekerjaan atau program penyediaan air minum dan sanitasi seperti dari dinas pekerjaan umum (PU) untuk merancang konstruksinya serta dari dinas kesehatan lingkungan untuk menguji apakah sumber air yang digunakan memenuhi syarat kelayakan, bersih dan higienis atau tidak.

Dari aspek disposisi, sikap aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sudah cukup baik karena aparat pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Edward III (1980:11) dalam Tahir (2014:68) jika implementasi program diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi juga mereka harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan program tersebut.

Dari aspek struktur organisasi birokrasi dalam implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tidak menetapkan prosedur atau standar khusus bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan aliran air minum dan juga sanitasi semua diatur oleh pemerintah Kelurahan Talikuran dan bagi masyarakat yang belum mendapatkan aliran air minum sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kepala kelurahan agar bersabar karena dana yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut tidak mencukupi. Mengenai hal tersebut Edward III (1980:11) dalam Tahir (2014:70) menjelaskan meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan program telah mencukupi dan para pelaksana

mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi program masih terhambat oleh inefisiensi struktur organisasi birokrasi dan ketersediaan anggaran atau pembiayaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini bahwa implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kelurahan Talikuran belum sepenuhnya efektif. Meskipun sebelum program dilaksanakan telah dikomunikasikan terlebih dahulu melalui kegiatan sosialisasi baik yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah maupun dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan masyarakat seperti hajatan pernikahan di tempat – tempat ibadah, pada perkumpulan kelompok yang dihadiri pemerintah kelurahan. Perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga menjadi salah satu faktor penyebab implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi tidak berjalan efektif.

Kualitas sumberdaya aparat pemerintah Kelurahan Talikuran dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi karena mereka tidak mempunyai keahlian khusus di bidang sanitasi dan penyediaan termasuk pengujian air minum yang layak digunakan masyarakat serta memenuhi syarat higienis atau kesehatan. Disposisi atau sikap pelaksana program, komitmen, konsistensi aparat pemerintah Kelurahan Talikuran dalam menjalankan program penyediaan air minum dan sanitasi sudah cukup baik. Hal ini Nampak dari nilai integritas, profesionalisme, komitmen dan sinergitas yang dimiliki pimpinan maupun staf pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kelurahan Talikuran belum sepenuhnya efektif. Dalam

mengimplementasikan program ini telah dilakukan pebagian tugas dan tanggung jawab kepada masing – masing staf akan tetapi masih saja terdapat kelemahan dalam pelaksanaan. Lemahnya struktur birokrasi yang dimiliki disebabkan ketidakmampuan aparat pemerintah Kelurahan Talikuran didalam melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi karena mereka tidak memiliki keahlian di bidang itu.

Mengacu pada hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi di Kelurahan Talikuran hendaknya dilakukan secara intensif kepada setiap masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat ditangkap dan dipahami dengan jelas.
2. Sumberdaya yang ada di Kelurahan Talikuran dapat tingkatkan terutama menyangkut hal keahlian khusus sehingga dalam pelaksanaan program seperti penyediaan air bersih dan sanitasi mereka dapat menguasai baik dalam merancang struktur bangunan maupun dalam keterampilan menguji kadar air minum yang layak dikonsumsi masyarakat.
3. Disposisi atau sikap pelaksana program penyediaan air minum dan sanitasi diharapkan lebih bertanggung jawab untuk menjalankan komitmen serta konsistensi dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat terutama yang ada di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi lebih dipermudah apalagi menyangkut urusan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan bantuan secepatnya dapat terlayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad R. 2004. *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta: ANDI
- Akib, H. 2012. *Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1-11.
- Asmadi, Khayan, Kasjono H.S. 2011. *Teknologi Pengolahan Air Minum*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Asmadi, 2011. *Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Amdal*. Salemba Pendidikan.
- Chandra, Budiman., 2012. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Joko T. 2010. *Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kusnaedi. 2010. *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*. Jakarta: Swadaya.
- Linsley, Ray K. 1995. *Teknik Sumber Daya Air, Jilid 1 dan Jilid 2*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Parawangi, Anwar. 2011. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pariata Westra dkk, 1989, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 *tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan*

Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

- Siagian, Sondang P, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutrisno, T., Suciastuti, E. 2010. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: Rineka Cipta Widowati, W., S
- Soemirat, J. 2011. *Kesehatan Lingkungan. Revisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Widowati, W., Sastiono, A., Jusuf, R. 2008. *Efek Toksik Logam*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Winter, Soren C, 2004. *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration. Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. Handbook of Public Administration*. London: Sage Publications Ltd.
- Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- WHO (World Health Organization). 2005. *Penyakit Bawaan Makanan*. Jakarta: EGC.